GERAKAN SANTRI DI SITUBONDO: TELAAH TERHADAP GERAKAN PROTES KAUM SANTRI PP. SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKOREJO ASEMBAGUS DALAM MENENTANG KORUPSI PENGUASA DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR

Imam Bonjol Jauhari
Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Jember

Abstract

This research studied the protest wave of the youth of santris of Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus. The protest wave had, then, escalated becoming a social movement refusing the corruption of Kas Daerah (district treasury) of Situbondo regency in the period of 2006-2007 done by Situbondo former regent Ismunarso.

This research is descriptive. Data was collected using depth interview, observation, and documentary methods. The data analysis followed Miles and Haberman view (1992: 13).

The conclution of the research are, first, the protest wave of the youth of santris of Situbondo regency had been appearing since the reign of Orde Baru (New Order) regime.

Scond, the appearance of the protest wave of the youth of santris was inseparable from the Indonesian student-lead Reformation movement, Pro-democratic movement, and people power movement. Public "euphoria" of democracy following Reformation movement lead to the appearance of the massively protest movements over central cities in Indonesia.

Third, the protest movement was caused by the disappointment toward the corruption, collusion, and nepotism (KKN) practice in Situbondo regency such as, (a), indication of corruption done by legislative and excutive elites; (b), disappointment of people lead by the abuse of people's social and economic rights; (c), disappointment of people caused by the weakness of the law informent toward thase who involved corruption.

Kata Kunci: Gerakan santri, Korupsi Pengusaha

PENDAHULUAN

Gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa Indonesia (kaum muda) berhasil melengserkan Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, dan melahirkan pemerintahan transisi demokratis pasca Orde Baru. Rakyat mulai

berpartisipasi melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Pendulum kekuasaan sudah bergeser, semula titik beratnya berada di tangan eksekutif (*executive heavy*), kini kekuasaan berada di tangan legislatif (*legislative heavy*). Kekuasaan legislatif ini tampak ketika menurunkan Presiden Abdurahman Wahid dengan tuduhan terlibat kasus *Buloggate* dan *Brunaigate*.

> Sinyalemen bahwa otonomi daerah hanya akan mengalihkan dan menyuburkan praktek korupsi di daerah tampaknya bukan hanya isapan jempol semata. Setidaknya hal ini terbukti dari banyaknya para pejabat daerah di seluruh Indonesia yang di kemudian hari terbukti melakukakan praktik korupsi, dan harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Salah satu kasus korupsi yang sangat menghebohkan adalah korupsi Kas Daerah Kabupaten Situbondo 2006-2007 yang dilakukan oleh mantan Bupati Situbondo Ismunarso.
>
> Dana kas daerah Situbondo senilai 86.093 milyar diberitakan raib dan tidak bisa dipertanggungjawabkan setelah Bupati Ismunarso menerbitkan surat kuasa yang ditujukan kepada Bank BNI '46 Cabang Situbondo untuk mengalihkan dana kas Situbondo 2006-2007 ke PT Sentra Artha Utama (PT SAU). Pengalihan tersebut dengan dalih investasi dengan bunga 2.5 persen per bulan. Namun, investasi tersebut kemudian bermasalah. PT SAU hanya mengembalikan dana Rp 42.3 milyar. Sedangkan sisanya, Rp 43.750 tidak tentu rimbanya.

Kongkalikong dana kas daerah Situbondo ini kemudian menuai gelombang protes kaum muda khususnya dari kalangan santri dan alumni Pondok Pesantren (P.P.) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus. Gerakan protes oleh ribuan kaum muda santri dilakukan dengan jalan memblokade jalur pantura.

Aksi protes yang terus berlanjut akhirnya memaksa KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi dana kasda senilai 43.9 miliar tersebut. Lewat amar putusannya tertanggal 5 Agustus 2009 hakim Tipikor kemudian mengganjar mantan bupati Situbondo Ismunarso dengan pidana kurungan selama 9 tahun penjara.

Penelitian ini mengkaji fenomena protes santri tersebut di atas. Masalah yang dikaji sebagai fokus penelitian adalah:

1. Mengapa muncul gerakan protes kaum santri P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menentang korupsi di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana gerakan protes kaum santri P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menentang korupsi di Kabupaten Situbondo?

Dengan mengambil fokus masalah sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. M enjelaskan sebab-sebab yang mendorong munculnya gerakan protes kaum

santri P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menentang korupsi di Kabupaten Situbondo.

2. Menjelaskan berkembangnya gerakan protes kaum santri P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menentang korupsi menjadi gerakan sosial di Kabupaten Situbondo.

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek. Dalam tataran *teoretis*, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi serta memperkaya kepustakaan ilmu-ilmu sosial keagamaan, terutama mengenai gerakan sosial keagamaan dan *civil society*. Sedangkan dalam tataran *praktis*, penelitian ini diharapkan sebagai referensi ilmiah bagi para aktivis gerakan sosial dan *civil society* khususnya di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan dengan sasaran penelitian, yaitu faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan sosial. Di samping itu diperlukan pula data mengenai strategi dan taktik gerakan dalam mencapai tujuan, dan peran aktor di dalam memobilisasi gerakan.

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sasaran penelitian dibutuhkan data yang relevan. Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sasaran penelitian, maka digunakaan teknik observasi dan wawancara mendalam, serta dokumentasi.

Data yang diperoleh baik melalui wawancara dan dokumentasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data. Teknik analisis data ini mengikuti Miles dan Haberman (1992:13). Ada tiga tahapan untuk menganalisis data, yaitu: Pertama, Reduksi data; Kedua, Penyajian data; Ketiga, menarik kesimpulan. Data dianalisis dengan kerangka pemikiran tertentu dari kajian pustaka sebagai berikut:

Kajian Pustaka

Dalam penelitian Muukkonen (1999) yang berjudul *"From Deviant Phenomenon to Collective Indentity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies"* berusaha memetakan bidang kajian gerakan sosial dengan menelusuri secara kritis berbagai teori gerakan sosial; dari teori prilaku kolektif, teori sumber daya manusia, teori proses politik, hingga teori gerakan sosial baru dan beberapa teori gerakan sosial lainnya.

Penelitian lain telah membuktikan secara empiris bahwa organisasi gerakan sosial sangat efektif dalam melakukan perubahan sosial. Hal ini tampak dari penelitian Gamson (1973) yang menemukan sebanyak 62 persen dari

organisasi protes meraih tujuannya, paling tidak sebagian. Sedangkan penelitian yang dilakukan Snyder dan Kelly (1976) mengungkapkan bahwa 64 persen pemogokan yang dilakukan gerakan buruh di Italia yang terjadi selama priode tahun 1878-1903 berakhir dengan keberhasilan di pihak pekerja.

Penelitian mengenai protes yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh Ngadisah (2002) di Kabupaten Mimika. Dalam penelitiannya yang berjudul *"Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika: Studi Kasus tentang Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport"* ini mengungkapkan sumber- sumber protes suku-suku yang berada di sekitar perusahaan Freeport. Unit penelitian Ngadisah yang mengambil Lembaga Masyarakat Amungme (Lemasa) ini membuktikan bahwa aksi-aksi kekerasan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang dilancarkan suku Amungme mengalami kegagalan, sehingga strategi kekerasan diubah dengan strategi kelembagaan (dengan mendirikan Yayasan Lemasa) untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Di samping itu, penelitian ini mengungkapkan pula terjadinya proses transformasi dari gerakan protes menuju gerakan sosial.

Penelitian lain dilakukan Abdul Wahid Situmorang (2003) yang berjudul *"Contentious Political in North Sumatera: The Batak Movement to Oppose a Pulp and Paper PT Inti Indorayon Utama"*, mebuktikan bahwa gerakan protes masyarakat Toba dalam menentang kehadiran PT Inti Indorayon Utama membuahkan hasil dengan ditutupnya perusahaan tersebut.

Pengertian Protes dan Gerakan Sosial

Menurut Lofland (2003: 2), yang mengumpulkan istilah protes dari berbagai kamus, kata protes itu adalah kata benda dan kata kerja yang mengandung pengertian; pernyataan pendapat secara beramai-ramai dan biasanya berupa pembangkangan; keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan; ekspresi penolakan secara lugas; deklarasi oleh pihak tertentu sebelum atau saat membayar pajak atau melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang dianggap ilegal, pengingkaran terhadap tuntutan yang dibebankan dan menuntut hak untuk melakukan klaim guna menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela; menyatakan (sesuatu hal) secara terbuka dimuka umum; melakukan deklarasi penolakan tertulis secara formal; bersumpah; berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai; mendudukan masalah pada proporsinya.

Pengertian mengenai gerakan sosial tersebut berbeda dengan para sosiolog lainnya, seperti dikemukan Turner dan Killian (1972:246) bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk meningkatkan atau menentang

perubahan dalam suatu masyarakat. Tetapi gerakan sosial sebagai manifestasi dari usaha bersama ini sangat menentukan peranannya. Namun, pernyataan ini perlu dibatasi karena gerakan sosial berbeda dengan partai. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa anggota di dalam gerakan sosial sangat cair, berbeda halnya dengan anggota partai politik yang ditentukan dengan kartu anggota partai (Turner dan Killian,1972:246).

Meskipun terdapat hal yang berbeda dalam mengartikan gerakan sosial yang disebabkan cara pandang berlainan, namun pada dasarnya gerakan sosial itu merupakan usaha bersama dalam melakukan perubahan atau sebaliknya. Menurut Haberle (1951: 6-8), gerakan sosial itu mengandung pengertian suatu gerakan bersama, suatu kekacauan di antara manusia, suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya perubahan dalam lembaga sosial tertentu. Hal ini berbeda dengan partai politik atau kelompok penekan, karena walaupun mempunyai kelompok tertentu yang terorganisir secara formal, namun gerakan demikian bukanlah kelompok yang terorganisir.

Gerakan Sosial sebagai Manifestasi Protes

Gerakan sosial pada dasarnya merupakan manifestasi protes terhadap keadaan yang buruk dan berusaha mengubahnya. Karena itu tidaklah mengherankan kalau Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa salah satu dari enam jenis gerakan sosial adalah gerakan memprotes keadaan atau peraturan yang tidak adil. Protes sebagai gerakan sosial ini memang merupakan hasil pengamatan Sartono Kartodirdjo mengenai gerakan protes petani di Indonesia sehubungan dengan perlakuan yang tidak adil. Dengan perkataan lain, gerakan protes sebagai gerakan sosial ini telah dilakukan petani Indonesia baik ketika di bawah pemerintahan kolonial maupun pasca-pemerintahan kolonial.

Gerakan sosial, menurut Lofland (2003: 25), haruslah terdiri dari (a) adanya organisasi kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang dibentuk secara independen; (b) bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/ atau protes terencana (terutama kumpulan) secara cepat; (c) kebangkitan opini massa; (d) semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral dan (e) sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur makro dan atau mikro dari lembaga-lembaga sentral.

Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial yang muncul diberbagai negara menjadi perhatian bagi sejumlah ahli sosiologi. Untuk memahami gerakan sosial yang muncul dan

berkembang di berbagai negara, temasuk di negara Indonesia, kiranya tidaklah keliru bila kita terlebih dahulu memahami teori gerakan sosial itu sendiri. Sebab, dengan memahami teori gerakan sosial tersebut akan memudahkan kita memahami fenomena gerakan sosial yang muncul. Di dalam gerakan sosial terdapat empat teori gerakan sosial, seperti teori Prilaku Kolektif (*collective behavior theory*), teori Mobilisasi Sumberdaya (*resource mobilization theory*), teori Gerakan Sosial Baru (*new social movement theory*) dan teori proses politik (*political process theory*). Ke-empat teori gerakan sosial ini adalah sebagai berikut:

Teori Prilaku Kolektif *(collective behavior theory)*

Teori prilaku kolektif ini tidak luput dari akar pemikiran struktural fungsionalisme dan interaksionisme, di samping pemikirannya lainnya. Dalam perspektif struktural fungsionalisme dan interaksionisme inilah teori prilaku kolektif ini akan dilihat dari berbagai pemikiran tokoh-tokohnya sesuai dengan akar teori yang mereka anut, atau yang mereka yakini.

Menurut Park dan Burgess (1924: 865), prilaku kolektif itu adalah prilaku dari induvidu yang berada di bawah pengaruh dorongan hati yang lazim dan kolektif. Dengan kata lain, prilaku kolektif itu merupakan hasil dari interaksi sosial. Bertolak dari rumusan ini, maka Park dan Burgess memasukan kerusuhan sosial (*social unrest*), gerakan massa (*mass movement*), kebangkitan kembali (*revival*), kerumunan (*crowds*), perubahan (*reform*), revolusi (*revolutions*) sebagai prilaku kolektif.

Teori Mobilisasi Sumber Daya *(resource mobilization theory)*

Teori mobilisasi sumber daya tersebut muncul tidaklah serta merta, melainkan kemunculannya disebabkan ada beberapa masalah yang tidak mampu dijawab teori prilaku kolektif, terutama ketika munculnya berbagai gerakan mahasiswa pada tahun 1960-an di Eropa dan Amerika. Kemunculan gerakan mahasiswa yang menuntut pembaruan ini tak mampu dijelaskan oleh teori prilaku kolektif. Karena itu gelombang gerakan mahasiswa tersebut telah mendorong para ahli untuk merumuskan kembali asumsi-asumsi teoretis yang ada sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan Snow dan Oliver (1995: 591), pendekatan sumber daya merupakan reaksi baik kekurangan dari pendekatan teori prilaku kolektif maupun protes mahasiswa yang terjadi pada tahun 1960-an.

7. Teori Gerakan Sosial Baru *(new social movement theory)*

Teori gerakan sosial baru ini menegaskan bahwa penyebab munculnya

gerakan-gerakan baru ini tak dapat dilepaskan dengan teori Karl Marx yang mengatakan bahwa "bangunan bawah", yakni ekonomi sangat mempengaruhi "bangunan atas" seperti politik, sosial dan budaya. Dengan perkataan lain, cara produksi kehidupan material akan mempengaruhi proses kehidupan politik, sosial dan budaya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaaannya, melainkan corak ekonomi yang menentukan kesadaran mereka. Corak ekonomi kapitalisme dan politik liberal memiliki kelemahan seperti adanya jurang yang lebar dalam penguasaan politik dan ekonomi, sehingga adanya realitas orang yang ditindas dan penindas dianggap hal yang wajar dan alamiah.

Teori Gerakan Sosial Baru menekankan peranan agen atau aktor perubahan bukan lagi kaum buruh atau petani, melainkan sangat beragam seperti feminis, ekolog, aktivis perdamaian, aktivis anti-nuklir, aktivis Hak Asasi Manusia dan pengusung otonomi. Para pelopor teori Gerakan Sosial Baru yang dimotori para pemikir yang tergabung di dalam *Frankfurt School* melihat bahwa munculnya Gerakan Sosial Baru dengan agen atau aktor yang berbeda, juga isu-isu yang diusung relatif berbeda dengan gerakan petani atau gerakan buruh.

Teori Proses Politik *(political process theory)*

Menurut Muukkonen (1999: 34), teori proses politik (*political process theory*) memperlihatkan betapa pentingnya memahami keadaan struktural mengenai aktivis-aktivis yang potensial maupun dukungan politik atau rintangannya. Gegasan ini berakar dari pemikiran Ralf Dahrendorf, yang dikenal sebagai revisionis Marxis dengan karyanya berjudul *Class and Class Conflict in Industrial Society* yang terbit pada tahun 1959.

Teori Proses politik tersebut, menurut Della Porta dan Mario Diani (1999:9), dapat menjelaskan secara sistematik mengenai lingkungan dan institusi politik dimana gerakan sosial beroperasi. Teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara lembaga aktor politik dan gerakan protes. Di dalam tatanan politik yang ada, gerakan sosial senantiasa berkaitan dengan aktor yang melakukan konsulidasi guna menempatkan posisi gerakannya yang tepat dalam tatanan politik yang ada. Konsep yang sudah berhasil dirumuskan dengan baik mengenai lingkungan eksternal, hubungan antara pembangunan dan gerakan sosial adalah konsep struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*).

Charles Tilly dan Sidney Tarrow telah mengembangkan konsep struktur kesempatan politik tersebut menjadi konsep yang penting dalam kajian gerakan sosial. Gagasan pokok dari konsep struktur kesempatan politik adalah membawa aspek-aspek perubahan ke dalam struktur (Muukkonen, 1999: 34). Dalam kaitan

dengan konsep struktur kesempatan politik ini, Peter Eisinger (dalam Della Porta dan Mario Diani, 1999: 9) menggunakannya untuk melakukan perbandingan mengenai hasil dari berbagai gerakan protes yang berbeda-beda di kota-kota Amerika Serikat.

Sejarah Singkat P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Berdiri di atas lahan seluas 11,9 hektar, P.P. Salafiyah Syafi'iyah Melalui pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang terletak di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Pada mulanya adalah Kiai Ruham asal Kembang Kuning, Pamekasan, Madura, merambah hutan yang membentang dari Gunung Baluran hingga Asembagus. Kawasan itu, dulunya dikenal hutan Suko Belos, yang artinya kesatuan antara hutan dan pantai, sebelum dikenal dengan nama Sukorejo. Penguasa waktu itu, adalah Kaji Maiya. Sebutan Kaji adalah untuk bangsawan setempat.

Hingga kini, orang mengenal dan menyebut kawasan itu Sukorejo, Asembagus, Situbondo. Padahal, Sukorejo ternyata adalah Dusun di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Eks Kawedanan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

Beberapa informan mengisahkan, proses perambahan hutan kala itu kerapkali terhenti karena banyaknya binatang buas yang menghuni Gunung Baluran. Namun, perjuangan berat itu pun akhirnya membuahkan hasil dan berdirilah pondok pesantren yang masih berupa gubuk. Sisa lahan rambahan, mereka manfaatkan sebagai lahan pertanian. Sejak itulah perjalanan pesantren ini dimulai.

P.P. Salafiyah Syafi'yah didirikan tahun 1914 oleh almarhum Kiai Syamsul Arifin alias Raden Ibrahim bin Ruham, kakek Kiai Achmad Fawaid pengasuh pondok pesantren sekarang ini. Raden Ibrahim bin Ruham, adalah kiai kelahiran Madura, tepatnya di Desa Kembang Kuning, Pamekasan, pada tahun 1841. Ketika menginjak remaja, ia menuntut ilmu di Makkah, Saudi Arabia.

Prosesnya, cukup panjang. Dimulai pada tahun 1908 atas saran Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah, ulama besar Semarang waktu itu, Kiai Syamsul Arifin dibantu putranya kala itu As'ad muda dan beberapa santri ayahnya. Masa kanak-kanak As'ad dilewati di Tanah Suci Makkah bersama kedua orang tua dan adiknya, R Abdurrahman. Pada usia 6 tahun ia pulang ke Pamekasan, Madura. Setelah 5 tahun di Madura, yaitu pada 1908, ayahnya, Kiai Syamsul Arifin, mempunyai gagasan mendirikan pesantren di Sukorejo, Asembagus, Situbondo.

Gerakan Protes terhadap Korupsi Kasda oleh Bupati Ismunarso

Keluhan (*grievance*) atau ketidakpuasan (*discontent*) masyarakat Situbondo pada masa pemerintahan Bupati Ismunarso sangat tinggi, karena banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan bupati. Realitas ini mencerminkan ketidakmampuan para elit di daerah ini mewujudkan cita-cita reformasi di tingkat lokal, terutama pemberantasan KKN. Hal ini menimbulkan kekecewaan atau keluhan (*grievance*) di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda Situbondo. Kekecewaan atau keluhan ini ditransformasi menjadi kesadaran bersama dalam bentuk aksi kolektif. Aksi kolektif ini dibangun untuk menghadapi prilaku kolektif para elite yang dinilai menyimpang. Yang pada gilirannya, kaum muda yang aktif dalam organisasi masyarakat sipil memprotes dan menuntut agar Bupati Ismunarso mengundurkan diri dan segera diproses secara hukum.

Dikatakan Jauarsah:

> "Mahasiswa melaporkan staf yang mengancam mahasiswa melakukan aksi. Pengancaman beberapa staf bupati itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu, ancaman tersebut adalah ancaman terhadap demokrasi yang diperjuangan rakyat Indonesia (wawancara, 10/7/2009).

Dalam konteks ini, gerakan protes kaum santri Situbondo dapat diletakkan sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*). Sebagaimana dikatakan Carl Boggs (1986), Gerakan Sosial Baru senantiasa mengangkat tema-tema gerakan mengenai lingkungan, hak asasi manusia, perempuan, anti-perang dan lain-lain, yang pada gilirannya membentuk berbagai corak gerakan, seperti gerakan lingkungan, gerakan hak asasi manusia, gerakan perempuan (gerakan feminisme), gerakan anti perang dan lain-lain. Hal senada dikemukakan Rajendra Singh (2002), corak dalam Gerakan Sosial Baru sangat plural dan kaya bentuk: mulai dari anti-rasisme, anti nuklir, perlucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme, etnisitas, hak asas manusia, kebebasan sipil dan lain-lain hingga kebebasan personal dan perdamaian.

Meskipun demikian, latar belakang kelas tersebut tidak menentukan identitas kolektif mereka. Sebab, aktor gerakan menentang korupsi ini memfokuskan gerakannya pada politik akar rumput dan membangun jaringan baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan membesarnya partisipan gerakan protes dan terbangunnya jaringan tersebut, gerakan santri senantiasa melancarkan gerakan protes yang lebih radikal dalam menentang korupsi pada era bupati

Ismunarso. Tujuan dari gerakan ini adalah melakukan perubahan politik dalam menegakkan hak-hak rakyat, terutama hak sosial dan ekonomi. Karena itu sasaran gerakan ini tidak lain adalah menggulingkan bupati dari tampuk kekuasasannya untuk melakukan perubahan. Sebagaimana ditegaskan gerakan protes kaum santri dalam pernyataan sikapnya yang disebarkan ke berbagai media masa lokal, bahwa tujuan Kaum Santri untuk mewujudkan perubahan adalah menggulingkan Bupati Ismunarso. Namun, aksi kaum santri yang menuntut bupati Situbondo dicopot, menghadapi aksi tandingan pro-bupati.

Penyebab Gerakan Protes Terhadap Korupsi di Kabupaten Situbondo

1. Keluhan *(Grievance)*

Munculnya gerakan protes atau gerakan sosial di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan dengan menggunakan teori prilaku kolektif (*collective behavior theory*) dan teori gerakan sosial baru (*new social movement theory*). Dikatakan Herbert Blumer, tokoh teori prilaku kolektif, bahwa sebelum aksi muncul terlebih dahulu ada kekecewaan atau keluhan (*grievence*) masyarakat sebagai problem sosial. Hal ini disepakati Turner dan Kilian (1987) seperti tampak dalam pernyataannya bahwa yang terpenting dari teori Herbert Blumer adalah konsepnya mengenai *grivance*. Hal ini berbeda dengan teori gerakan sosial baru yang melihat keluhan dalam bentuk "baru".

Kedua teori tersebut di atas digunakan untuk menjelaskan *grievance* dan *new-grievance* yang dialami masyarakat Situbondo. Adapun bentuk *grievance* yang dirasakan masyarakat Situbondo adalah korupsi di tingkat elit politik eksekutif dan legislatif dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan *new-grievance* yang dialami masyarakat Situbondo adalah pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi rakyat akibat korupsi dilakukan elit lokal. Bentuk-bentuk keluhan ini merupakan penyebab munculnya gerakan protes di Kabupaten Situbondo yang diuraikan di bawah ini.

2. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam konteks ini, Junaidi (wawancara 3/8/2009) menilai bahwa korupsi di daerah Kabupaten Situbondo dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebab, praktek korupsi yang dilakukan para elit di daerah Situbondo adalah "mengambil uang" dari APBD. Hal ini, tentu saja, tidak sekedar merugikan negara melainkan telah melanggar hak-hak rakyat Situbondo. Karena uang negara itu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan perekonomian rakyat, tetapi bila uang APBD itu dikorupsi maka hak-hak rakyat

untuk menikmati perkembangan ekonomi menjadi terampas.

3. Struktur Kesempatan Politik ***(political opportunity structure)***

Kemunculan gerakan protes kaum santri di kabupaten Situbondo, selain dari keluhan (*grievance*) atau kekecewaan (*discontent*) sebagaimana dikemukan teori prilaku kolektif (*collective behavior theory*), juga dapat dijelaskan melalui teori proses politik (*political process theory*), terutama konsep *political opportunity structure*. Dalam teori ini masalah lingkungan politik menjadi pusat perhatian dalam hubungannya dengan gerakan sosial, karena itu keadaan struktural sangat menentukan bagi aktor-aktor gerakan, baik konteks politik maupun dukungan politik. Karena itu, aktor gerakan sosial dalam konsep struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) ini dapat saja berupaya memperluas kesempatan politik. Di samping itu, keterbukaan sistem politik akan memperbesar dan mendorong gerakan sosial tumbuh, seperti dikemukakan Eisinger (dalam Della Porta dan Mario Diani, 1999)

Struktur peluang politik yang berubah, terutama adanya iklim yang demokratis, telah mendorong munculnya berbagai organisasi gerakan sosial di kabupaten Situbondo. Di bawah ini akan diuraikan struktur kesempatan politik (*Political opportunity Structure*) yang terdapat di kabupaten Situbondo, dan yang mendorong muncul dan berkembangnya organisasi gerakan sosial, baik dalam bentuk forum, aliansi, koalisi, himpunan, serikat maupun "front perlawanan"

4. Keterbukaan Ruang Politik

Toleransi elit politik lokal terhadap aksi-aksi kolektif merupakan salah satu bentuk dari keterbukaan politik. Keterbukaan politik ini tentu saja memberikan ruang bagi munculnya organisasi gerakan sosial, dan peluang politik ini akan diperluas oleh aktor gerakan sosial melalui strategi-strategi aksi guna mencapai tujuan organisasinya. Toleransi elit politik lokal ini juga cermin dari perubahan prilaku politik, sehingga interaksi antara aksi kolektif dan aktor negara relatif demokratis. Sikap toleransi elit politik lokal terhadap gerakan protes tercermin dari pernyataan Afifuddin M:

> "...Saya kira munculnya gerakan-gerakan protes di daerah Kabupaten Situbondo berkaitan dengan kondisi politik yang telah berubah.... Sekarang ini jauh berbeda, ada keterbukaan atau ada iklim politik yang demokratis....Bagi saya protes-protes dari kaum santri, LSM maupun mahasiswa itu positif, karena masyarakat dapat mengontrol pemerintah daerah. Jadi, ya, silahkan saja mereka unjuk rasa dan memprotes. Itu hak

mereka, tak boleh dihalangi. Hanya saja, unjuk rasa atau protes mereka hendaknya tetap berada dalam koridor demokrasi, tidak boleh bersikap anti-demokrasi, seperti bertindak anarkis....Bagi saya, ada tiga elemen penting yang perlu kita sadari. Ada pemerintah, ada pengusaha, dan ada mahasiswa/santri. Ketiga elemen ini mempunyai fungsi masing-masing, jika ketiganya berjalan secara sinergis maka akan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.....Jadi, aksi-aksi protes dari kaum muda atau organisasi sosial itu adalah perwujudan dari fungsinya dalam melakukan kontrol, kalau ini misi dari mahasiswa atau organisasi sosial, ya, tidak ada masalah. Di sinilah mereka bisa jadi mitra pemerintah untuk sama-sama menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN..." (wawancara, 14/8/2009)

5. Kebebasan Pers

Media massa lokal yang gencar memberitakan praktik korupsi dan gerakan kaum muda menentang korupsi di Kabupaten Situbondo adalah harian *Surya, Radar Banyuwangi, Radar Jember,* di samping media massa yang berbasis di Jakarta, seperti surat kabar harian *Kompas* dan *Republika,* serta majalah *Tempo* dan *Forum Keadilan.* Media massa inilah yang memberikan informasi mengenai korupsi kepada masyarakat, juga menyebarkan informasi mengenai gerakan-gerakan protes kaum muda menentang praktik korupsi yang dilakukan elit lokal, sehingga dapat membentuk opini masyarakat luas untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Sebab, bilamana masyarakat telah menyadari bahaya dari praktik korupsi yang dilakukan elit eksekutif, legislatif dan yudikatif bagi kehidupan rakyat, maka diharapkan dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam memberantas korupsi.

Menurut Syamsurizal (wawancara, 7/8/2009), wartawan harian *Surya* yang bekerja di wilayah Kabupaten Situbondo, iklim demokrasi di era reformasi ini telah mendorong sejumlah wartawan dengan bebas mendirikan organisasi untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hal ini tidaklah mungkin dapat dilakukan di masa Orde Baru, di mana wartawan "diwajibkan" berada di dalam organisasi tunggal bernama PWI.

6. Perpecahan Elit Politik Lokal

Perpecahan elit politik di tingkat nasional, juga diikuti pula perpecahan elit politik di tingkat lokal, seperti perpecahan elit lokal di tubuh Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo. Sejumlah pejabat Pemda yang reformis atau pejabat yang

menyadari perubahan politik, segera bergabung dalam barisan gerakan reformasi di tingkat lokal, atau beberapa elit politik di tingkat lokal menyepakati tuntutan dari gerakan reformasi daerah. Sebagaimana dikatakan Afifuddin:

> "...Gerakan KS menentang korupsi di daerah ini, memang didukung beberapa pejabat dan pengusaha di daerah ini, tetapi dukungan mereka dilakukan secara diam-diam, terutama pejabat yang menjadi lawan politik bupati, Ismunarso. Umumnya dukungan terhadap KS ini adalah pejabat dan para pengusaha yang menentang praktek KKN, atau lawan-lawan politik dari Bupati.....Dukungan pejabat Pemda ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena mereka rasa khawatir diketahui pimpinannya, dan posisinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat terancam. Bentuk lain dari dukungan para pejabat tersebut, di antaranya memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan KS sehubungan dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi, juga ada beberapa pejabat dan pengusaha memberikan dukungan finansial yang jumlahnya relatif kecil bilamana KS menggelar demonstrasi..." (wawancara, 15/8/2009).

Organisasi Gerakan: Bersatu untuk Memprotes

Dalam konteks gerakan protes kaum muda menentang korupsi di kabupaten Situbondo, mendirikan organisasi gerakan sosial merupakan pilihan untuk memobilisasi massa guna menghadapi penguasa lokal yang dinilai korup seperti organisasi Kaum Santri (KS). Respon sejumlah aktivis organisasi gerakan sangat antusias ketika KS didirikan sebagai organisasi gerakan. Antusiasme yang kuat dari kaum muda ini dikarenakan gerakan-gerakan protes sebelumnya mengalami kegagalan karena terpragmentasi dan terkooptasi.

Dalam teori mobilisasi sumber daya (*mobilization resource theory*), kehadiran organisasi sangat penting untuk membangkitkan dan mempertahankan partisipasi induvidu atau kolektif dalam sebuah gerakan. Dalam konteks inilah dapat dipahami berdirinya organisasi KS dapat dikatakan sebagai "kendaraan" kolektif untuk mengembangkan gerakan, di samping digunakan pula untuk memobilisasi struktur (*mobilizing structure*).). Adapun yang dimaksudkan dengan "mobilisasi struktur" adalah sarana kolektif, formal maupun nonformal, yang digunakan orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri di dalam aksi kolektif (McAdam, McCarthy dan Zald dalam Klandermans, 2005:384).

Kepemimpinan

Karena peran kepemimpinan sangat penting di dalam organisasi gerakan atau organisasai gerakan sosial, maka dalam hal ini, pengasuh pondok Sukorejo KH.Fawaid A. turun langsung memimpin gerakan protes, disamping dijadikan symbol gerakan social oleh actor-aktor gerakan yang dalam rangka mengefektifkan jalannya gerakan protes di kabupaten Situbondo.

Wibawa serta nama besar KH.Fawaid, langsung membangkitkan spirit massa untuk tidak kenal lelah melakukan aksi protes sampai tuntutan KS terpenuhi. Tidak terlalu sulit mencari penyebab mengapa aksi-aksi protes yang dilancarkan oleh KS mencapai sukses dalam mendesakkan kepentingannya. Organisasi massa yang sebenarnya mempunyai kesadaran kritis tersebut, sebetulnya masih menaruh hormat dan patuh terhadap otoritas tokoh sekelas pengasuh pondok Sukorejo.

Strategi Aksi

Organisasi gerakan di dalam mencapai tujuannya, tentu saja, menerapkan strategi aksi tertentu. KS dalam menggelar berbagai aksi memilih strategi aksi gabungan antara strategi kekerasan (*violence*) dan non-kekerasan (*non violence*) dalam mewujudkan tujuan gerakan. Sebagaimana dikemukan Tilly (2002), ada dua strategi besar di dalam inovasi aksi kolektif (*inovative collective action*), yakni; (1) menggunakan cara kekerasan atau non-kekerasan, (2) menggunakan kombinasi antara cara kekerasan dan non-kekerasan. Kedua strategi ini senantiasa digunakan aktor-aktor gerakan sosial, tetapi dengan bentuk-bentuk yang beragam dan inovatif.

Strategi kekerasan digunakan KS ketika menuntut Kejari Situbondo agar segera menangkap Bupati Ismunarso, yang telah diidentifikasi sebagai aktor intelektual dalam kasus korupsi kasda. Massa KS yang menilai Kejari "plintat-plintut" dalam menegakkan hukum, kemudian merusak gedung pengadilan dan rumah Dinas Kejari dengan mencoret-coret dinding dan menggembok pintu serta menyegelnya. Aksi kekerasan lain yang mendapat liputan luas dari media massa, yaitu pemblokadean jalur pantura selama 3x24 jam sehingga memaksa KPK dan Tim kejati Jatim untuk berjanji secepatnya mengusut tuntas kasus korupsi Kasda kabupaten Situbondo.

Namun, sebelum KS menggunakan strategi kekerasan dalam aksi kolektifnya tersebut, terlebih dahulu KS menerapkan strategi non-kekerasan dalam bentuk aksi simbolik; massa KS membakar garu dan kemenyan, yang biasanya digunakan untuk mengusir setan. Aksi simbolik ini, pada dasarnya ingin menyimbolkan jiwa penegak hukum tengah dirasuki setan, karena itu KS ingin "mengusir setan-setan" yang mempengaruhi aparat penegak hukum sehingga mereka yang kerap

menelikung hukum dapat bertindak sebagaimana mestinya sebagai aparat hukum. Jika "setan-setan" yang diberi garu dan kemeyan itu berlari dari tubuh aparat penegak hukum, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Situbondo. Aksi simbolis lain yang diterapkan KS adalah dengan memberikan "Trophi Juara Koruptor" di daerah Situbondo yang diserahkan kepada DPRD Situbondo oleh KS, dan aksi simbolis lainnya adalah menyerahkan "Kado" kepada DPRD Situbondo yang berisi tuntutan agar anggota dewan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi di daerah Kabupaten Situbondo.

Strategi non-kekerasan tersebut juga diterapkan KS ketika menggelar aksi mogok makan di halaman DPRD Situbondo. Aksi mogok makan ini bertujuan untuk menarik simpatik anggota dewan untuk menggelar Sidang Istimewa guna melengser kan Bupati Ismunarso karena diduga terlibat berbagai kasus korupsi di Situbondo. Aksi mogok makan berhenti setelah tuntutan KS dipenuhi anggota dewan untuk menggelar Sidang Istimewa. Dengan kata lain, strategi aksi non-kekerasan yang diterapkan KS berhasil. Kendati Sidang Istimewa itu sendiri gagal digelar DPRD Situbondo karena sarat dengan kepentingan politik.

Tipologi aksi yang diterapkan KS di atas, dapat dikatakan berhasil menjatuhkan bupati Ismunarso setelah ditetapkan bersalah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi oleh hakim Tipikor dan dijatuhi hukuman kurungan selama 9 tahun pada tanggal 5 Agustus 2009.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, gerakan protes kaum muda di Kabupaten Situbondo sudah muncul pada saat rezim Orde Baru berkuasa. Gerakan protes terwujud dalam bentuk keterlibatan kaum muda menjadi "aktor" dalam gerakan-gerakan protes petani. Hal ini dikarenakan aktor gerakan prodemokrasi (aktivis LSM dan aktivis mahasiswa) mengambil posisi "lebur-bersama" dalam gerakan protes petani. Di samping aktivis prodemokrasi itu melebur dalam gerakan protes petani, juga melakukan pendidikan kritis terhadap petani guna memberdayakan petani sebagai "subyek" dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kedua, munculnya gerakan protes kaum muda terhadap praktik korupsi di Kabupaten Situbondo, tidak dapat dilepaskan dengan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa Indonesia, gerakan prodemokrasi dan gerakan rakyat.

Melalui "euphoria", berbagai gerakan protes muncul di kota-kota besar.

Ketiga, penyebab munculnya gerakan protes dikarenakan adanya kekecewaan atau keluhan masyarakat terhadap praktik korupsi KKN di Kabupaten Situbondo, seperti (a) adanya indikasi korupsi yang dilakukan elit legislatif dan eksekutif yang tidak hanya merugikan negara, terapi praktik korupsi tersebut juga telah merugikan rakyat, bahkan praktik korupsi yang dilakukan pemegang kekuasaan di pemerintahan daerah itu telah melanggar hak-hak rakyat, terutama hak sosial dan hak ekonomi; (b) adanya kekecewaan dan keluhan masyarakat terhadap aras pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat akibat praktik korupsi yang dilakukan elit yang memegang kekuasaan; dan (c) adanya kekecewaan dan keluhan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi.

Selain itu, munculnya gerakan protes kaum muda terhadap korupsi juga disebabkan adanya struktur kesempatan politik, di antaranya: (a) adanya perpecahan di kalangan elit politik, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif di tingkat lokal. (b) adanya kebebasan pers yang dapat memberitakan informasi mengenai korupsi yang ditemukan oleh masyarakat, sehingga dapat membentuk opini public.

Keempat, untuk melakukan perubahan tersebut maka kaum muda memandang perlu adanya organisasi gerakan protes atau organisasi gerakan sosial (Lofland, 2003). Gerakan protes kaum santri (KS), sudah bisa dianggap memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikemukakan Sztomka (2004).

Kelima, gerakan protes kaum muda menentang korupsi di Kabupaten Situbondo, menempatkan hak asasi manusia dalam memandang praktik korupsi yang dilakukan elit politik di tingkat lokal. Karena itu, gerakan sosial di Kabupaten Situbondo ini dapat dikatakan sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*) karena jika dilihat dari aktor gerakan protes menentang korupsi, maka dapat diletakkan gerakan protes kaum muda tersebut dalam bentuk gerakan sosial baru.

Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, penelitian ini ingin memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, gerakan-gerakan protes yang muncul di daerah Kabupaten Situbondo bukanlah ancaman terhadap kekuasaan pemerintah daerah Klabupaten Situbondo, melainkan sebagai wujud partisipasi politik dari anggota masyarakat dalam mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Kedua, untuk mencapai tujuan dari gerakan sosial maka diperlukan

pengetahuan mengenai gerakan sosial, terutama para aktivis gerakan sosial sehingga dapat membesarkan peserta dan membangun jaringan secara sistematik dan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, George Junus. 2004. *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivis dan Wartawan*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Amzulian Rifai. 2003. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ben Agger. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Blumer, Herbert. 1957. **Collective Behaviour**, dalam Gitler J.B. (ed.), *Review of Sociology: Analysis of a Decade*, New York: John Wiley and Son.

Calhoun, Craig.1995. **New Social Movement of Early Nineteenh Century**, dalam *Repertoirs & Cycles of Colective Aevtion*, Duke University Press: Durham and London.

Dela Porta, Donatella & Mario Diani. 1988. *Social Movements An Introduction*,. United Kingdom: Blackwell Publisher Inc.

Joe Foweraker. 1995. *Theorizing Social Movements*. Pluto Press: London – Bulder Colorado.

Keefer, Philip. 2004. **Korupsi dan Ekonbomi Politik Indonesia**, dalam Pramono U. Tanthowi dkk, *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muihammadiyah.

Klandermans, Bert. 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Klitgaard. Robert. 1988. *Membasmi Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kriesi, Hanspeter, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak, Marco G., Giugni. 1997. **New Social Movements and Polical Opportunities in Western Europe**, dalam Doug McAdam dan David A Snow, *Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics*, California: Robury Publishing Company.

Lofland, Jhon. 2003. *Protes: Suatu Studi Tentang Prilaku Kelompok dan Gerakan Sosial*. Terjemahan Luthfi Ashari. Yogyakarta: INSIST Press.

Fakih, Mansour. 2000. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

McAdam, Doug, Jhon D. McCarthy, Meyer N Zald. 1999. *Comparative Perspectives On Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Sructures, and Cultural Framings.* United Kingdom: Cambridge University Press.

Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial.* Yogyakarta: INSIST Press.

Panjaitan, Hinca IP. 2000. *Menuju Kemerdekaan Pers 2000.* Jakarta: Internews Indonesia

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional.* Bandung: Mandar maju.

Sanapiah Faisal. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sliman, Adam B. 1992. *The Idea of Civil Society.* New York: The Free Press.

Smelser, Neil. 1970. *Theory of Collective Behaviour,* Third Impression, London: Routledge & Kegan Paul.

Sills., David L. 1972. *International Encyclopedia of the Social Sciences,* New York: The Macmillan Company & The Free Press.

Tarde, Gabriel. 2004. "Gabriel Tarde: Sumber-Sumber Psikologi Sosial" dalam Philip Cabin dan Jean Franqois Dortier (ed), *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya,* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movemen: Social Movements and Contentious Politics,* second edition. United Kingdom: Cambridge University Press.

Tilly, Charles, Doug McAdam & Tarrow. 2002. *The Dinamic of Contentious,* Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, Louise A dan Charles Tilly (eds). 1981. *Class Conflict and Collection Action,* Baverly Hills: Sage.

Turner, Ralph H dan Lewis Killian. 1972. *Collective Behavior,* New Jersey: Prentive Hall-Enggelwood Clifts.

Touraine, A.1985. **Social Movement and Social Change,** dalam Orlando Fals Bonda (ed.) *The Challenge of Social Change.* Sage: London.

Vredenbregt, Jacob.1980. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat,* Jakarta: PT Gramedia.